



Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime



Alamat Jurnal: <https://ejournal.upi.edu/index.php/kemaritiman>

PEMBANGUNAN KEAMANAN DAN INSPEKSI MARITIM DI LAUT NATUNA UTARA: MASA KINI DAN REKOMENDASI UNTUK MASA DEPAN

Lutfi Al-Fiah* dan Agussalim Burhanuddin

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Kota
Makassar, 90245, Indonesia.

*Corresponding author, e-mail: lutfialfiah257@gmail.com

ABSTRACT	ARTICLE INFO
<p><i>Northern Natuna is a highly strategic region with all the potential for plentiful Marine resources. But the Northern Natuna region is not free of such problems as the influx of foreign fishermen and the territorial border dispute between Indonesia and China, which is also a challenge and a threat to Indonesian sovereignty. The purpose of the study is to explain the recent developments of Marine security and the related inspection activities to secure the region of Northern Natuna from internal and external threats. Research methods use qualitative types of research with data collection techniques for library research and are then analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. Research has shown that building security and North Natuna Sea inspections still need to be increased by five elements of collaboration such as government, academic, community, business and media.</i></p>	<p>Article History: <i>Submitted/Received 08 021 2023 First Revised 09 022 2023 Accepted 10 002 2023 First Available online 12 001 2023 Publication Date 12 001 2023</i></p> <hr/> <p>Keyword: <i>Inspections, Maritime Security, North Natuna, Pentahelix</i></p>
<p>© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI</p>	

1. PENDAHULUAN

Setiap negara yang memiliki wilayah perairan laut akan selalu menjadikannya sebagai sumber kekuatan dan kekayaan mereka. Hal tersebut mendorong adanya keinginan untuk membatasi batas maritim mereka sendiri, meskipun disisi lain negara-negara juga berupaya untuk memastikan bahwa laut lepas tetap terbuka bagi semua pengguna. Adanya manfaat ekonomi dari pengembangan agenda ekonomi biru juga menjadi bagian dari agenda eksploitasi sumber daya alam perikanan dan kelautan yang berkontribusi terhadap perekonomian negara (Galani dan Malcolm, 2020).

Perairan Natuna menjadi salah satu wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Natuna memiliki luas lautan hingga 264.198.37 km², dengan luas sebesar 99% dari keseluruhan total luas wilayah yang dimilikinya. Oleh karena itu, Natuna dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi kekayaan komoditas laut yang besar. Menurut Diskominfo Natuna (2021), di tahun 2014 potensi sumber daya laut seperti pemanfaatan jenis ikan demersal sekitar 25% dan pelagis kecil sekitar 37% serta ikan laut yang mencapai kurang lebih 500 ribu ton per tahun. Sementara itu jika merujuk pada data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) Indonesia, perairan Natuna memiliki potensi terhadap ikan demersal hingga 159.700 ton, rajungan 9.711 ton, ikan pelagis 327.976 ton, lobster 1.421 ton serta kepiting 2.318 ton per tahun (KKP, 2015). Menurut KKP (2015) wilayah Natuna Utara menjadi salah satu lokasi yang umumnya didatangi oleh kapal besar yang berada di luar lokasi 4 mill laut yang terletak di wilayah Natuna.

Selain aspek ekonomi, terdapat aspek keamanan yang menjadi prioritas bagi setiap negara yang memiliki perairan laut untuk memastikan terjaganya kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman pihak dalam maupun luar. Komunitas yang melimpah di perairan natuna utara menjadi sebuah potensi besar sekaligus ancaman bagi pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga wilayah tersebut, terutama wilayah laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Natuna Utara memang sudah sejak lama menjadi rebutan bagi negara. Misalnya, Malaysia yang mencoba mengklaim wilayah ini, namun karena tidak ingin ada konflik jangka panjang, maka tahun 1962-1966 pemerintah negeri jiran menghentikan upaya klaim tersebut. Setelah konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, kemudian disusul dengan adanya sentimen anti Tionghoa di wilayah Natuna (Tampi, 2017).

Sejak konflik Laut China Selatan mulai muncul, Indonesia secara tegas menyatakan tidak mempunyai klaim atas sengketa di wilayah tersebut. Namun pada 17 Juni 2016, masalah kemudian menjadi urgen ketika klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. Terkhusus pada klaim China atas perairan Natuna Utara. Dasar China melakukan tindakan klaim sepihak sangat berbeda dengan kebijakan penetapan wilayah ZEE di Indonesia yang merujuk pada Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) pasal 57 "Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melewati batas dari 200 nautikal mill laut diukur dari garis-garis pangkal yang menjadi

titik pengukuran luas laut teritorial". Namun China hampir mengklaim 80% wilayah LCS dengan dasar *nine dash lines*.

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) negara akan ditentukan atas dasar aturan yaitu 200 mil ditarik dari titik terluar pantai pada sebuah pulau. Dari konvensi tersebut, Natuna Utara jelas merupakan bagian kedaulatan dari Indonesia. Namun yang menjadi masalah adalah munculnya China yang gencar menggaungkan statement perairan Natuna sebagai bagian dari tradisional fishing ground nya. Tentu saja hal tersebut merupakan klaim sepihak dari China yang didasarkan oleh konsep sembilan garis putus-putus atau nine dash line. Akibatnya, nelayan asal China melakukan eksploitasi sumber daya perikanan di perairan Natuna Utara (Kompas, 2017).

Namun berdasarkan pernyataan lembaga IOJI (Indonesia Ocean Justice Initiative) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini tidak terdapat ancaman yang signifikan dari kapal penangkap ikan yang berbendera China di laut Natuna Utara. Padahal sebelumnya banyak kapal ikan berbendera China yang terdeteksi berada dalam zona timur laut Natuna Utara dan merupakan bagian dari CMM (China Maritime Militia). Saat ini China diketahui lebih sering menempatkan kapal penelitian ilmiah kelautan dan China Coast Guard untuk beroperasi di laut Natuna Utara (IOJI, 2023).

Keamanan maritim sejatinya menghubungkan masalah keamanan internal dengan masalah keamanan eksternal. Ancaman bersifat transnasional dan saling berhubungan, serta memerlukan solusi cerdas karena tidak ada satu pihak pun yang dapat menjamin keamanan maritim nya sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk memaparkan lebih lanjut mengenai perkembangan keamanan maritim dan inspeksi sebagai upaya dalam menjaga kedaulatan maritim nasional serta mencoba untuk menawarkan rekomendasi terkait keberlanjutan dalam peningkatan keamanan maritim di masa depan.

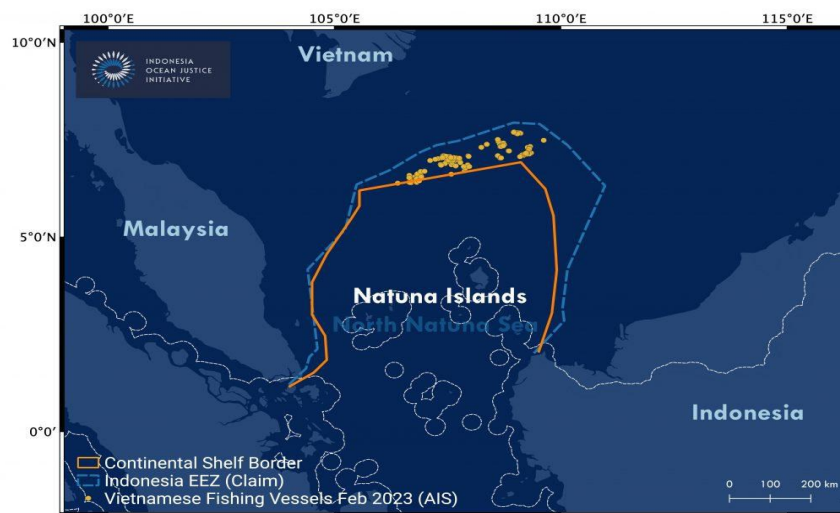
2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penggambaran fakta empiris, data dan argumen yang relevan. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif akan menggambarkan tentang bagaimana peran aktor Pentahelix dalam pembangunan keamanan dan inspeksi maritim laut Natuna Utara di masa depan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan *library-research* atau studi pustaka. Data-data dikumpulkan melalui sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data tersebut diperoleh dari berbagai literatur (termasuk E-Book), seperti buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, report dan situs di internet yang berkaitan dengan kasus pelanggaran di Natuna Utara, upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di laut Natuna Utara, hukum internasional, masalah kelautan dan perikanan dan serta upaya mengatasi praktik pelanggaran dengan inspeksi maritim di Natuna Utara

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terletak di wilayah terluar Indonesia, di kepulauan natuna terdapat produksi gas bumi yang berasal dari Star Energy sebesar 3.226.284 MMBTU di tahun 2022. Sementara terdapat 304 ribu barel produksi minyak mentah di Natuna yang kemudian berpotensi untuk mendorong nilai tambah daerah. Selain itu, potensi perikanan di Laut Natuna juga sangat besar. Daerah tempat penangkapan ikan umumnya berada di sekitar Laut Natuna Utara, Bunguran, Pesisir Pulau Natuna, Natuna Besar, Midai, dan Pulau Serasan (Al Rasyid, 2023). Menjadi salah satu tempat paling berpotensi, Natuna Utara tentu menjadi salah satu sumber kekuatan dan kekayaan dari Indonesia.



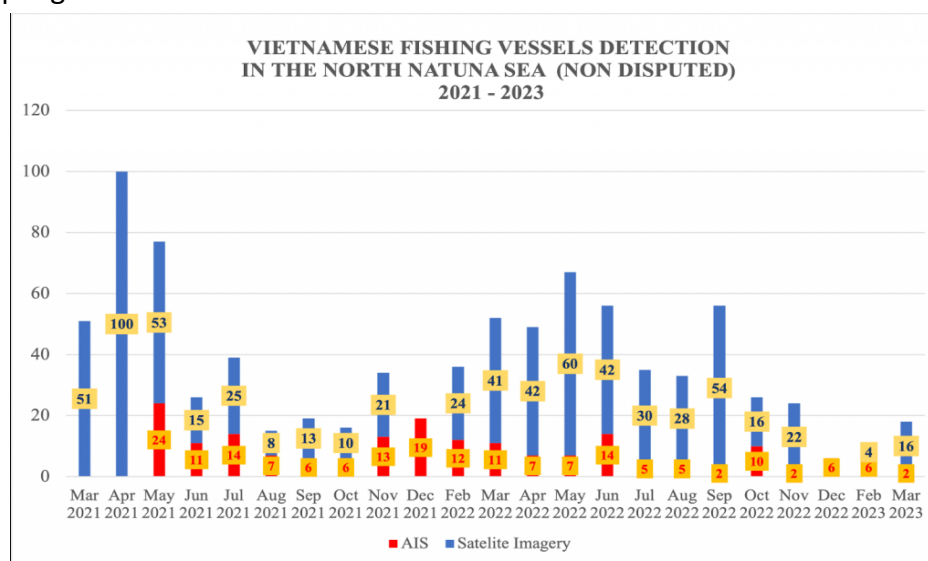
Gambar 1: Laut Natuna Utara
(Sumber: Ocean Justice Initiative)

Selain berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Laut Natuna Utara juga berbatasan dengan perairan tiga negara seperti Malaysia, Indonesia dan Vietnam (Atnan dan Diah, 2019). Perbatasan bukan hanya memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lain, namun juga dapat menjamin keamanan masing-masing negara. Perbatasan dalam konteks suatu negara bisa dilihat sebagai aspek praktik keamanan negara atau fungsi keamanan (Fauzan et al. 2019). Faktanya perbatasan sangat rentan dengan konflik, pergolakan politik, radikalisme, terorisme serta tindakan pelanggaran lainnya. Oleh karena itu perbatasan dan keamanan maritim akan selalu relevan dalam wacana dan kebijakan strategis di Indonesia. Inti dari keamanan maritim adalah kebebasan navigasi di laut. Sehingga segala pelanggaran terhadap kebebasan navigasi dianggap sebagai upaya dalam keamanan maritim (Mich dan Banyu, 2016).

Ancaman dalam konteks wilayah maritim akan mengancam kedaulatan suatu bangsa dan negara. Hal tersebut juga berlaku dalam konteks ancaman laut Natuna Utara Indonesia.

Analisis keamanan laut Natuna Utara yang bersumber dari *Automatic Identification Systems* (AIS) dan citra satelit telah mendeteksi keberadaan *dark vessels* di Laut Natuna Utara ([Ocean Justice Initiative, 2023](#)). Terpantau di area ZEE yang sempat mengalami klaim tumpang tindih antara Vietnam dan Indonesia, tercatat sekitar 155 kapal asal Vietnam telah beroperasi di wilayah tersebut pada bulan Februari 2023. Ratusan kapal yang beroperasi tersebut menggunakan alat tangkap *pair trawl* untuk menangkap ikan di sebelah utara garis landas kontinen. Padahal sebagian dari wilayah tersebut sudah menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia setelah adanya kesepakatan garis batas ZEE pada Desember 2022.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh IOJI sejak 2021 hingga 2023, terdapat aktivitas kapal ikan yang berasal dari Vietnam baik di area non-sengketa maupun sengketa area klaim ZEE yang tumpang tindih antara Indonesia dan Vietnam.



Gambar 2. Data Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara (Sumber: Ocean Justice Initiative)

Hasil deteksi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kapal ikan Vietnam meningkat di kedua daerah tersebut pada Maret 2023 (**Gambar 2**). Dalam “Summary of the Latest Situation and Analysis of IUU Fishing in The North Natuna Sea” peneliti IOJI mengungkapkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara lumrahnya menurun di bulan November sampai Januari ataupun Februari.

BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) RI diketahui telah menangkap KIA (Kapal Ikan Asing) berbendera Vietnam pada Agustus 2023. Diduga Kapal Ikan tersebut melakukan illegal fishing dengan jumlah muatan 5 ton ikan di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia di Laut Natuna Utara. Berdasarkan keterangan dari Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI kapal Vietnam tersebut ditangkap oleh KN. Marore-322 Bakamla RI dan ditemukan 12 Anak Buah Kapal ([Michella, 2023](#)).

Selain merugikan dalam aspek ekonomi, kasus kapal Vietnam yang melakukan tindakan pelanggaran di Laut Natuna menjadi ancaman nyata bagi keamanan maritim. Sebagai respon banyaknya pelanggaran tersebut, sejumlah nelayan mengharapkan pemerintah dapat memperkuat pengamanan di perairan Laut Natuna Utara. Mereka mengharapkan adanya kesatuan pengamanan baik dari laut maupun udara dalam satu komando untuk melakukan

inspeksi di Laut Natuna Utara yang menjadi wilayah paling rawan didatangi kapal asing. Selain itu mereka berharap ditingkatkannya jumlah personel, armada dan intensitas pengawasan dalam melakukan inspeksi atau patroli di Laut Natuna Utara (Antara, 2022).

Kepedulian pemerintah begitu diperlukan sebagai pemegang kekuasaan dan pembuat ketetapan (Sulistiyono dan Pradjoko, 2018). Untuk membangun suatu negara, selain pendekatan ke daratan diperlukan juga pendekatan kemaritiman. Konsep pembangunan ekonomi archipelago menyatakan bahwa Nusantara merupakan kesatuan ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Konsep tersebut memberikan pengertian bahwasanya pembangunan juga harus diorientasikan ke arah perairan laut bukan hanya ke arah daratan. Jika dibawa dalam konteks Laut Natuna Utara saat ini, penting untuk memperhatikan kelanjutan pembangunan keamanan maritim serta pemasifan kegiatan inspeksi sebagai ikhtiar dalam menjaga kedaulatan nasional.

Kapal menjadi hal yang erat relevansinya dengan inspeksi maritim karena memperoleh manfaat dan resiko paling besar (Knapp dan Christiaan, 2020). Ditjen PSDKP mencoba menguraikan bagaimana operasi pengawasan ketaatan kapal di pelabuhan pangkalan dilaksanakan. Operasi dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap kapal-kapal perikanan yang berizinkan SIPI/SIKPI dan SLO (Surat Laik Operasi) sesuai pangkalan. Selain dokumen perizinan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, alat tangkap, fisik kapal, dan keaktifan transmitter. Baru setelahnya dapat dilakukan penerbitan SLO. Meskipun demikian terdapat keterbatasan pengawasan di Laut Natuna yang berdampak pada keamanan maritim. Jika membandingkan antara luas wilayah Laut Natuna yang harus diawasi, maka jumlah sumber daya manusia yang melakukan pengawasan di wilayah lautan tersebut tidak sebanding (Hikmah. et al. 2022).

Penerapan Model Pentahelix dalam Pembangunan Keamanan dan Inspeksi Maritim

Konsep pentahelix awalnya berasal dari teori triple helix yang meyakini bahwasanya adanya hubungan kuat antara pemerintah, pelaku bisnis dan akademisi akan mendorong inovasi yang baik. Kemudian pentahelix muncul sebagai konsep yang berupaya untuk mengkolaborasikan lima pihak terkait untuk bersinergi dalam pengembangan inovasi ekonomi maupun ilmiah (Khouroh et al. 2022). Jika dibawa dalam konteks pembangunan keamanan dan inspeksi maritim di laut Natuna Utara, maka dengan menggunakan penerapan model pentahelix peran masing-masing pihak akan semakin jelas dalam pembangunan. Otoritas pemerintah dapat berperan sebagai *regulator*, akademisi sebagai *conceptor*, bisnis sebagai *enabler*, komunitas sebagai *accelerator* dan media sebagai *expenders* (Alamsyah, 2021). Dalam model kolaborasi pentahelix diperlukan peran dari masing-masing aktor untuk berkontribusi berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun peran aktor tergambar sebagai berikut:

- 1) Pemerintah sebagai *regulator* dan *controller* memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam membangun keamanan dan inspeksi maritim. Sebagai pihak yang juga memiliki otoritas terhadap pengambilan keputusan, koordinator serta pengawas dalam

keberlangsungan negara dan secara spesifik membawahi lembaga- lembaga negara seperti halnya pertahanan dan keamanan, maka peran dominan pemerintah dalam mengatur dan mengontrol lembaga tersebut akan sangat dibutuhkan dalam Pembangunan di Laut Natuna Utara. Fungsi keamanan teritori menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga pertahanan dan keamanan untuk memastikan wilayah laut Natuna Utara dapat aman dan tenteram.

- 2) Akademisi sebagai *conceptor*, menjadi sumber pengetahuan dalam pembuatan teori dan konsep terbaru yang relevan dalam berkontribusi terhadap percepatan serta peningkatan pembangunan keamanan dan inspeksi maritim jangka panjang. Kontribusi konsep dan teori bukan hanya berkontribusi terhadap akademisi lainnya, namun juga terhadap unsur atau pihak lainnya dalam hal perencanaan strategis kerja mereka.
- 3) Bisnis sebagai enabler akan menjadi pihak fasilitator atau penengah dalam pembangunan Natuna Utara. Mengingat kawasan Natuna Utara merupakan jalur yang punya nilai ekonomi yang tinggi, sehingga keamanan lalu lintas sangatlah penting untuk para pelaku bisnis. Dengan adanya keamanan di laut, pelaku bisnis juga dapat memaksimalkan potensi sumber daya laut yang ada dengan tetap berpegang pada prinsip berkelanjutan dan inklusif. Penerapan kedua prinsip tersebut kemudian dapat meningkatkan nilai tambah dan berkontribusi pada pendapatan negara yang akhirnya dapat teralokasi kembali lewat pendanaan keamanan dan inspeksi maritim di Natuna Utara.
- 4) Komunitas sebagai accelerator atau alat pemercepat program perencanaan strategis yang ditujukan untuk percepatan pertumbuhan, pembangunan dan keberhasilan suatu program dari pemangku kepentingan. Komunitas dapat bertindak sebagai penghubung atau perantara para pemangku kepentingan. Dalam konteks laut Natuna Utara, komunitas nelayan menjadi salah satu pihak yang dapat harus diperhitungkan dalam strategi pembangunan keamanan dan inspeksi maritim. Selain sebagai penghubung mereka dapat menjadi komponen pendukung keamanan dan inspeksi maritim setelah lembaga pertahanan dan keamanan pemerintah.
- 5) Media sebagai *expenders* memiliki fungsi terhadap publikasi informasi yang luas kepada masyarakat umum mengenai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan, berjalan atau bahkan telah tercapai. Sebagai wilayah terluar Indonesia dan rawan konflik dan tindakan pelanggaran, banyak hal yang menjadi perhatian masyarakat luas yang kemudian mempertanyakan bagaimana strategi yang akan dilakukan pemerintahnya untuk memastikan negara tidak akan merugi karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di laut Natuna Utara. Di sinilah peran media bermain dalam penyebaran informasi perencanaan, progres dan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat luas. Transparansi penting sebagai upaya untuk mempertahankan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahnya.

Sebagai ikhtiar untuk membangun keamanan dan inspeksi maritim di Laut Natuna Utara, diperlukan kolaborasi 5 unsur terkait untuk saling bersinergi satu sama lain. Tidak hanya

pemerintah sebagai komponen utama yang bertanggung jawab atas keamanan dan inspeksi maritim, namun diperlukan juga komponen pendukung seperti akademisi, pelaku bisnis, komunitas dan media untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik. Peran masing-masing pihak akan sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Oleh karenanya perlu kesadaran kelima pihak tadi bahwa mereka adalah satu kesatuan dan sinergitas adalah kunci dari keberhasilan dalam pembangunan keamanan dan inspeksi maritim di Laut Natuna Utara.

4. Kesimpulan

Keamanan maritim sejatinya menghubungkan masalah keamanan internal dengan masalah keamanan eksternal. Ancaman bersifat transnasional dan saling berhubungan, serta memerlukan solusi cerdas karena tidak ada satu pihak pun yang dapat menjamin keamanan maritimnya sendiri. Jika membandingkan antara luas wilayah Laut Natuna yang harus diawasi, maka jumlah sumber daya manusia yang melakukan pengawasan di wilayah lautan tersebut tidak sebanding. Oleh karena itu kolaborasi pihak pendukung juga sangat dibutuhkan untuk membangun keamanan dan inspeksi maritim di laut Natuna Utara.

Penulis merekomendasikan penerapan model penta helix dalam pembangunan keamanan dan inspeksi maritim saat ini dan untuk masa yang akan datang. Peningkatan kolaborasi 5 unsur seperti pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan keamanan maritim di Natuna Utara. Peran masing-masing pihak akan sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Oleh karenanya perlu sinergitas antara satu pihak dengan pihak lain untuk keberlanjutan pembangunan keamanan dan inspeksi maritim di Laut Natuna Utara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, A. 2023. Berada di Wilayah Terluar Indonesia, Ini Potensi Kekayaan Natuna yang Berlimpah. Url: <https://daerah.sindonews.com/read/1035427/194/berada-di-wilayah-terluar-indonesia-ini-potensi-kekayaan-natuna-yang-berlimpah-1677661423>. [Diakses 18 Oktober 2023].
- Alamsyah. 2021. Mewujudkan Prinsip-Prinsip Penta -Helix Dalam Mengelola Kekayaan Negara (Studi Kasus Penataan Sungai Citarik). Diakses melalui laman <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14311/Mewujudkan-Prinsip-Prinsip-Penta-Helix-Dalam-Mengelola-Kekayaan-Negara-Studi-Kasus-Penataan-Sungai-Citarik.html>. [Diakses 20 Oktober 2023].
- Antara. 2022. Nelayan Minta Pengamanan Laut Natuna Utara Diperkuat. Url: <https://daerah.sindonews.com/read/976287/194/nelayan-minta-pengamanan-laut-natuna-utara-diperkuat-1671693166>. [Diakses 19 Oktober 2023].

- Atnan, R.R dan Diah Apriani Atika Sari. 2019. Pemutakhiran Peta di Kawasan laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. *Belli Ac Pacis*. Vol. 5 No. 1, 18-31.
- [Diskominfo Natuna]. (2021). Potensi Laut Natuna dan Illegal Fishing. Url: <https://diskominfo.natunakab.go.id/potensi-laut-natuna-dan-ilegal-fishing/>. [Diakses 2 Oktober 2023].
- Fauzan, et al. 2019. Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing. *AEGIS* .Vol. 3 No. 2, 94-114.
- Galani, S., Malcolm D. E. 2020. Maritime Security and the Law of the Sea: Help or Hindrance?. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*. Vol. 10, No. 1, 94-97
- Gusti, Bagus Dharma Agastia & AA. Banyu Perwira. 2016. *Maritime Security in the Indo-Pacific*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 151 hlm.
- Hikmah, A.A et al. 2022. Ancaman terhadap Perairan Laut Natuna oleh Pelaku Illegal Fishing. *Aufklärung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No. 4, 362-369
- [IOJI] Indonesia Ocean Justice Initiative. (2023). *155 Kapal Ikan Vietnam Beroperasi di Zona Tumpang-tindih Klaim ZEE Indonesia-Vietnam di Laut Natuna Utara*. URL: <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/02/28/155-kapal-ikan-vietnam-beroperasi-di-zona-tumpang-tindih-klaim-zee-indonesia-vietnam-di-laut-natuna-utara/>. [Diakses 03 Oktober 2023].
- Kompas. 2017. Pro Kontra Penenggelaman Kapal, Ini Komentar Kadin. Url: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/10/203236326/pro-kontra-penenggelaman-kapal-ini-komentar-kadin>. [Diakses 03 Oktober 2023].
- Khourouh, Umu. et al. 2022. The Role of Pentahelix's Effective Collaboration in Developing the Frugal Innovation Strategy for the "Pekarangan Pangan Lestari (P2L)" Program. *7th ICGSS Sustainable Innovation Legal Policy, Alternative Technology and Green Economy*, Vol.4. No. 5, 15-23
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. Analisis data Pokok Kementerian dan Perikanan. Pusat Badan Statistik dan Informasi KKP RI. Url: http://perpustakaan.kkp.go.id/knowledgerepository//index.php?p=show_det aild&i d=13930. [Diakses 15 November 2023]
- Knapp, Sabine & Christiaan Heij. 2020. Improved Strategies for the Maritime Industry to Target Vessels for Inspection and to Select Inspection Priority Areas. *Safety*. Vol.6. No.2, 1-18
- Michella, Widya. 2023. Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Bermuatan 5 Ton Ikan di Laut Natuna Utara. Url: <https://nasional.sindonews.com/read/1175087/14/bakamla-tangkap-kapal-vietnam-bermuatan-5-ton-ikan-di-laut-natuna-utara-1691935696>. [Diakses 20 Oktober 2023].

Sulistiyono S. T., Pradjoko, D. 2018. *Sejarah Peradaban Maritim: Peranan Sungai dalam Sejarah Peradaban Maritim di Jambi dan Riau*. Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI. 143 hlm

Tampi, B. 2017. Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol.23. No.10. 1-16